

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN SUMBER DAYA ALAM KELAPA SAWIT UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA

**Suhela Putri Nasution¹, Abdurrozzaq Hasibuan^{2*}, Budhi Santri Kusuma³,
Syarifah A'ini⁴, Arini Fajriani⁴, Intan Sadillah⁴.**

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Agroteknologi, Universitas Prima Indonesia, Medan.

²Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

³Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area Medan.

⁴Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara.

*Corresponding Author E-mail ; rozzaq@uisu.ac.id

E-mail : suhelaputrinasion4@gmail.com, budhi@staff.uma.ac.id, syrfhainii02@gmail.com

Abstract

Keywords:

Community
Empowerment and
Economic
Empowerment

Community Empowerment is an economic development concept that encapsulates community values to build a new paradigm in development that is people-centered, participatory. In this context, efforts to empower the community (empowering) can be studied from three aspects, the first is enabling, namely creating an atmosphere that allows the community's potential to develop. Second, empowering, namely strengthening the potential of the community through concrete steps involving the provision of various opportunities that will make the community more empowered. Third, protecting, namely protecting and defending the interests of the weak. Economic empowerment is an effort to become a strong, large, modern and highly competitive economy. The method used in the literature review begins with selecting a topic, then determining keywords to search for journals using Indonesian through the database, namely Google Scholar. Based on several explanations put forward. The main goal of community empowerment is to improve people's welfare through their potential so that they are able to improve a better quality of life through self-help activities.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak pulau-pulau didalamnya serta terdiri dari berbagai ras, agama, suku, budaya hingga tradisi. Indonesia juga memiliki banyak sumber kekayaan alam yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk rakyat Indonesia. Kekayaan tersebut bukan hanya ada di kota namun juga tersebar sampai pelosok desa di Indonesia. Hal ini yang menjadikan desa-desa di pelosok Indonesia memiliki potensi tersendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat bukan hanya semata tugas dan wewenang dari pemerintah pusat saja, melainkan tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Peran pemerintah desa dibutuhkan untuk memantau keadaan di setiap daerah dan memberi fasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa.[1]. Dalam upaya meningkatkan perekonomian desa diperlukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini merupakan upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktivitas masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat pada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengelola dengan baik dan menjadikan masyarakat dapat berperan secara aktif dan terlibat langsung dalam pemberdayaan sumber daya alam yang ada. Pemberdayaan ini dilakukan untuk menjamin dan menjaga kelestarian, pemanfaatan sumber daya dan pada akhirnya dapat menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah yang bersangkutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Kebijakan Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial, telah melakukan pembangunan sosial telah melakukan pembangunan sosial melalui Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat. Pembangunan Sosial sebenarnya adalah system totalitas pembinaan yang dirancang untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan dengan mendayagunakan unsur manusia, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan nya mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial menurut [2] adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan pandangan soetomo (2010) mengenai kesejahteraan dilihat berdasarkan pandangan kultural prespektif lokal, banyak didasarkan pada pandangan kultural masyarakat yang bersangkutan.

Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merang kum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*. Dalam rangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari tiga aspek: Pertama, **Enabling** yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, **Empowering** yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, **Protecting** yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.[3]

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. [4]Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak yang dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan sengan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Dalam berbagai organisasi, warga negara akan belajar untuk saling percaya dan menjadi semakin terampil dalam mengatasi masalah melalui tindakan kolektif. Pemberdayaan masyarakat harus memasukkan dimensi modal sosial sebagai salah satu komponen nya. Pemberdayaan masyarakat akan mengalami kegagalan tanpa menyadari pentingnya melibatkan dimensi kultural dan mendayagunakan peran modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat dalam mempercepat dan mengoptimalkan hasil dari proses pemberdayaan itu sendiri. Modal sosial yang berisikan trust, reciprositas, norma sosial dan nilai-nilai etis merupakan pondasi penopang yang akan menentukan perkembangan dan berkelanjutan beragam aktifitas usaha di berbagai sektor kehidupan.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan merujuk pada kondisi dan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih baik dari sebelumnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu untuk menyampaikan pendapat, mempunyai mata pencarian, ikut serta dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005). Tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya : Dimaksudkan agar individu, kelompok, dan masyarakat memiliki kekuatan atas kehidupannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan dan segala bentuk keterbelakangan. Dengan demikian kelompok yang tidak berdaya ini bisa mandiri dan tidak senantiasa tergantung pada individu serta kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.[4]

Guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya perlunya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersifat hemat, efisien, efektif,

akuntabel serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Pasalnya, perilaku dan budaya seperti ini memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan dalam masyarakat sehingga terbangun suatu komunitas yang kuat, maju, dan mandiri dalam pencapaian pembangunan masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, karena setiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya. Artinya upaya mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktur ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh. Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijaksanaannya.

Menurut Wharton Pemberdayaan ekonomi ialah kontinum perilaku ekonomi yang bergerak dari morak subsistem yang pada umumnya tidak responsif terhadap ekonomi yang ditawarkan ke arah moral ekonomi rasional yang sangat responsif terhadap pembaharuan. Pemberdayaan ekonomi juga merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi mampu membuat masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya, dalam pemberdayaan ekonomi akan memprioritaskan kepada sumber daya manusia dan sumber daya alamnya.

Dari uraian di atas jelas bahwa pemberdayaan ekonomi pada dasarnya menyangkut lapisan masyarakat yang paling bawah yang dinilai kurang mampu, sehingga perlu adanya bantuan dari pihak seperti bantuan ekonomi tersebut dapat terwujud, dengan demikian taraf hidup masyarakat akan lebih meningkat.

Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan salah satu kegiatan yang lebih menekankan proses. Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan sangat diperlukan. Dengan menekankan pada proses maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap berikut : *Penyadaran*, pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka dan dilakukan secara mandiri. *Pengkapasitasan*, sebelum diberdayakan masyarakat perlu diberdayakan kevakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai. *Pendayaan*, pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Tahapan program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.[5]

Tahapan *capacity building* dan *networking*, tahapan ini mencakup :

Melakukan pelatihan, *workshop* dan sejenisnya untuk membangun setiap kapasitas setiap individu masyarakat agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program. Berupa anggaran dasar organisasi, sistem dan prosedurnya. Membangun jaringan dengan pihak luar pemerintah daerah setempat yang mendukung kelembagaan lokal.

Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan

Melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan bersama masyarakat. Tahap evaluasi mencakup [5]: a. Memantau setiap pemberdayaan yang dilakukan, b. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan. Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap tahapan pemberdayaan. Tahap terminasi, tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan (Adi, 2007). Dalam (Falah & Zaki, 2007) menyebutkan untuk memberdayakan masyarakat terdapat tiga hal yang harus dilakukan yaitu : Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat Pemberian perlindungan dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Strategi adalah cara untuk mengarahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (independent) dan mandiri (sumaryo, 1991). Hikmat (2001:12) menjelaskan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain, kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi atau kreativitas, mudah pasrah atau menyerah atau putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu atau tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.

Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Sehingga, pada akhirnya pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas sosial masyarakat. [6] Masyarakat akan memiliki kemandirian, kemampuan mobilisasi sosial dan akses sumber daya ekonomi, serta partisipasi yang luas dalam proses pembangunan daerah.

Pemberdayaan ekonomi yang efektif dan efisien diperlukan strategi agar memperoleh hasil yang maksimal. Strategi pemberdayaan serta pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Setidaknya ada dua strategi besar yang dapat diterapkan yaitu :

Peningkatan akses dalam aset produksi (*Production Asset*): bagi masyarakat yang masih dominan dalam ekonomi masyarakat, modal produktif yang utama adalah tanah. Di samping itu akses masyarakat kepada lingkungan hidup yang sehat yang tidak tercemar akan mengurangi beban dan menambah produktifitas masyarakat. Akses kedalam modal harus diartikan sebagai keterjangkauan, yang memiliki sisi pertama, ada pada saat diperlukan dan yang kedua, dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya.

Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat sebagai produsen dan penjual posisi kekuatan rakyat sangatlah lemah. Mereka adalah *price taker* karena jumlahnya yang sangat banyak pasar masing-masing yang sangat kecil. Karena kualitas dan tingkat keterampilan rendah menjadi karakteristik pula dari ekonomi rakyat.

Gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya kesejahteraan rakyat. Maka, pilihan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya dilaksanakan dalam beberapa langkah strategi, sebagai berikut :[6]

Pemberian akses yang lebih besar kepada aset produksi yaitu sumber daya yang melimpah. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat dan dengan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tenaga kerja yangampil, menguasai keterampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian wirausaha.

Pemerataan pembangunan antar daerah agar masyarakat muda mengakses bantuan modal usaha dan banyaknya pelatihan ketenagakerjaan. Dengan demikian, inti pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan ialah mensejahterakan masyarakat dalam dimensi lahir dan batin.

Faktor Pendorong Pemberdayaan Ekonomi

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat dibutuhkan faktor pendorong yang dapat mendorong terjadinya pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang penting dalam setiap program pemberdayaan ekonomi. Maka pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi harus mendapatkan penanganan yang serius. Sebab sumber daya manusia adalah unsur paling fundamental penguatan ekonomi.

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah salah satu sumber daya pembangunan yang sangat penting dalam proses pemberdayaan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sumber daya alam ini telah dimanfaatkan sejak jaman dahulu dari masa kehidupan nomaden sampai jaman industri.

Permodalan

Permodalan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam aspek permodalan yaitu bagaimana pemberi modal tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat serta dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah supaya dapat berkembang kearah yang lebih maju.

Prasarana Produksi dan Pemasaran

Pendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha diperlukan prasarana produksi dan pemasaran. Jika hasil produksi tidak dipasarkan maka usaha akan sia-sia. Maka dari itu komponen penting lainnya dalam pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi adalah tersedianya prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran seperti tersedianya alat transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat serta pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi, tersedianya prasarana dan pemasaran penting untuk membangun kearah yang lebih maju[7].

Definisi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah semua material atau bahan yang disediakan oleh alam baik dalam wujud bentuk padat, cair, dan gas dan memiliki manfaat terhadap makhluk lainnya terutama manusia. Sumber daya alam terdiri atas dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tetap ada untuk menopang dan mendukung kehidupan manusia. Kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam sifatnya mutlak, artinya bahwa kehidupan manusia tergantung pada daya dukung material alam.

Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam terletak pada tiga aspek yang harus dipenuhi, yakni ketersediaan yang cukup, berkualitas, dan dapat dijangkau. Ketiga aspek ini sangat penting dan wajib dipenuhi, mengingat bahwa kualitas lingkungan tempat kita beraktivitas cenderung menurun karena berbagai bentuk pencemaran, luas yang tetap dan diperparah oleh populasi manusia yang makin besar, menyebabkan kebutuhan dan penggunaan sumber daya alam semakin tinggi.

Macam-macam Sumber Daya Alam

Sumber daya tidak saja meliputi jumlah bahan yang ada menunggu untuk diolah dan digunakan, tetapi sumber daya alam itu sendiri juga dinamis dan berubah-ubah sifatnya. Macam-macam sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Sumber daya alam yang tidak habis (*sustainable resources*)
Jenis yang pertama dari sumber daya alam menurut sifatnya ialah sumber daya alam yang tidak habis atau selalu ada di alam. Beberapa contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti sinar matahari, udara, angin, dsb.
2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*)

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang relative mudah untuk dipulihkan dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Proses pembaharuan dari sumber daya alam ini dapat dilakukan secara alamiah maupun rekayasa manusia, seperti reproduksi dan pengembangan.

3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*irreplaceable resources*)

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah kebalikan dari sumber daya yang dapat diperbaharui, yakni merupakan jenis sumber daya alam yang apabila persediaannya habis maka untuk menyediakan kembali akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama tergantung jika kondisi lingkungan juga memungkinkan. Sumber daya tidak dapat diperbaharui mencakup sumber daya logam, minyak bumi, batu-bara, dll.

Sumber Daya Alam Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, bumi dan semua yang berada di dalamnya pada hakikatnya diciptakan Allah untuk manusia (Q.S. 2: 29). Segala yang ada di langit dan bumi, daratan dan lautan, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak semuanya diciptakan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia (Q.S. 6: 141). [3]Manusia adalah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan dan manusia diberikan keberanian untuk mengelola bumi. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diserahkan kepada manusia sehingga manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. (QS. 2: 30) dan memegang tanggungjawab mengelola bumi dan memakmurkannya (QS. 33: 72). Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. 28: 77). Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an di atas, Rasulullah SAW memberikan teladan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari hadits-hadits Nabi, seperti hadits tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, sebagian dari iman, dan merupakan perbuatan baik.

Rasulullah SAW juga melarang merusak lingkungan mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang kencing atau membuang kotoran (manusia) di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh. Rasulullah juga sangat peduli pada kelestarian satwa, sebagaimana diceritakan dalam hadits riwayat Abu Dawud. Dalam hadits tersebut di ceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya yang pada saat perjalanan, mereka mengambil anak burung yang berada di sarangnya.[3]

Karena anaknya dibawa oleh salah seorang dari rombongan Rasulullah tersebut, maka sang induk terpaksa mengikuti terus ke mana rombongan itu berjalan. Melihat yang demikian, Rasulullah lalu menegur sahabatnya tersebut dengan mengatakan, “Siapakah yang telah menyusahkan induk burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikan anak burung tersebut kepada induknya!”. Atas dasar ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah di atas, maka kaitannya dalam berinteraksi dan memanfaatkan alam serta lingkungan hidup itu, manusia secara umum mengemban tiga amanat dari Allah.

Pertama, al-intifa’ yaitu mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaikbaiknya demi kesejahteraan dan kemaslahatan. Kedua, al-i’tibar, yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah SWT seraya dapat mengambil ibrah dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islah yaitu manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Allah SWT telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum pelestarian lingkungan adalah wajib (Abdillah, 2015: 11-12).

Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungannya. Untuk membiasakan diri ramah terhadap lingkungan, maka dituntut beberapa prinsip kaitannya dengan perilaku manusia dalam memperlakukan alam. Pertama, prinsip hormat terhadap alam. [8]Dalam pandangan Islam, manusia diutus melainkan hanya untuk rahmat bagi alam semesta (QS. 21: 107). Kedua, rahmat bagi alam semesta bukan hanya sekedar dijadikan sebagi motto Islam, akan tetapi justru merupakan tujuan dari Islam itu sendiri.

Dari tujuan tersebut maka Islam mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menghormati alam semesta baik terhadap jagat raya yang meliputi manusia dan makhluk hidup lainnya serta benda-benda mati. Sikap hormat terhadap alam merupakan prinsip yang paling mendasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semestanya. Sama halnya, setiap anggota komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama, demikian pula setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai dan menghormati setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu, serta memiliki kewajiban moral untuk menjaga kebersamaan dan integritas komunitas ekologis, alam tempat hidup manusia ini.[8]

Ketiga, prinsip tanggung jawab. Kaitanya dengan prinsip hormat terhadap alam di atas merupakan tanggung jawab pelaku moral terhadap alam karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehingga manusia disebut sebagai bagian integral dari alam. Kenyataan ini melahirkan prinsip moral bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak.

Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaga, memanfaatkan, mengelola, dan melestarikannya. Keempat, prinsip solidaritas, yang terkait dengan dua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas. Sama halnya seperti diatas bahwa segala yang diciptakan oleh Allah SWT diciptakan terlepas dari kepentingan manusia atau tidak. Artinya, manusia dan ciptaan lainnya memiliki kedudukan yang setara di mata Allah SWT. Sehingga kenyataan ini membangkitkan dalam diri kepedulian terhadap alam dan makhluk hidup yang lainnya. Kelima, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam.

Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam sudah menjadi sebuah keharusan sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Dengan demikian, manusia memiliki peranan sangat penting dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Islam merupakan agama yang memandang lingkungan (alam) sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kadar keimanan manusia terhadap Tuhannya, karena manifestasi keimanan seorang terletak pada perilaku manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Islam juga memiliki konsep yang detail dalam mengelola dan melestarikan lingkungan (alam) sepertihalnya dijelaskan diatas. [9] Dalam Islam sudah jelas bahwa pada hakikatnya dalam pengelolaan sumber daya alam prinsip yang paling mendasar adalah perlakuan manusia (moralitas) terhadap alam.

Hal ini tentu sejalan dengan pergerakan biosentris yang mendasarkan moral pada keluhuran hidup baik pada manusia maupun makhluk hidup yang lainnya, khususnya alam. Adalah suatu keharusan memperhatikan konsumsi atau memanfaatkan kekayaan alam. Potensi alam sangatlah berlimpah sehingga apabila kekayaan itu digunakan secara sembrono maka akibatnya tujuan kekayaan dan distribusi ekosistem akan mengalami kerusakan karena tidak seimbang antara daya konsumsi dengan daya pembaharuan atau penjagaan alam.

Apalagi pada hakikatnya manusia memiliki sebuah kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Secara praktis keinginan manusia jika yang satu sudah terpenuhi maka muncul keinginan yang lain. Menimbang keterbatasan dan kekritisian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui perlu adanya upaya untuk meminimalisir keinginan manusia demi terjaganya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam perlu diatur sedemikian rupa agar tidak mengeringkan aliran sumber daya alam untuk penggunaan dan pengeluaran yang tidak mengarah pada keseimbangan ekosistem dan keluhuran kehidupan.[9]

Oleh karena itu, dimensi moral harus ditanamkan yang dalam hal ini melalui pergerakan biosentris sebagai alternatif yang tepat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam pergerakan moralitas tentunya perlu menjadikan manusia sebagai pelaku moral dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam sebagai pondasi awal penyadaran manusia untuk memiliki moral dalam berinteraksi dengan manusia dan alam. Manusia tidak hanya mengkonsumsi dan memanfaatkan alam sesuai dengan kepuasan diri akan tetapi mampu mengelola lingkungan sebagai bagian dari kehidupannya.

Kita tahu bahwa kesadaran manusia terhadap lingkungan begitu rendah. Hal tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja karena kita tidak dapat hidup jika tidak ada lingkungan hidup yang mampu menopang kehidupan kita. Artinya, ketika lingkungan hidup rusak sama halnya ancaman terhadap

kehidupan dan tempat tinggal. Dengan kata lain, kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk merawat dan memelihara lingkungan. Upaya penyadaran dan pembentukan moral manusia terhadap lingkungan ini saja tidak cukup untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Secara umum dikarenakan keterbatasan modal finansial eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mengundang intervensi pemodal besar sebagai investor, antara lain dengan dalih akan mampu memberikan manfaat dalam bentuk pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin di sekitarnya. Akan tetapi skema seperti ini dari banyak pengalaman justru berkontribusi besar merusak tatanan masyarakat adat yang banyak hidup di wilayah yang kaya akan sumber daya alam.

Pola seperti ini menghadap-hadapkan masyarakat adat dengan pemilik modal dan pemerintah sebagai fasilitator di lapangan. Namun, berbagai kasus telah membuktikan, bahwa pembangunan meneruskan semangat kolonialisme dengan merampas tanah masyarakat adat, melakukan peminggiran dan merusak pola produksi dan tatanan politik masyarakat adat. Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Termasuk diharapkannya penerapan otonomi daerah karena kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat sentralistik.

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah harapan karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung mendikte pemerintah daerah agar mau mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Akibatnya, kebijakan yang sentralistik tersebut, masyarakat menuntut dan melakukan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat daerah.

Penelitian Terdahulu

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Sejahtera (Study Kasus di Kabupaten Sragen).[10]

Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan di Kabupaten Sragen selama periode 2010-2014 adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dicapai melalui berbagai kebijakan alternative yang dilaksanakan melalui 4 kelompok program yakni :

- Bantuan dan perlindungan sosial
- Pemberdayaan masyarakat
- Pemberdayaan usaha mikro dan kecil
- Program prorakyat

Permasalahan utama di wilayah kabupaten sragen adalah masalah kemiskinan, terutama bagi penduduk yang tinggal di wilayah desa yang lahan nya tidak subur atau lahan kering seperti wilayah utama Sungai Bengawan Solo. Di Kabupaten Sragen keluarga miskin tahun 2011 sebanyak 87.768 KK atau (308.783 jiwa). Rincian nya keluarga sangat miskin 36.282 KK, Miskin 25.745 KK dan Hampir Miskin 25.741 KK (data TNP2K Sragen 2011). Sedangkan data BPS. Kabupaten Sragen (PPLS-Pendataan Program Perlindungan Sosial), jumlah keluarga miskin sebanyak 115.566 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 349.027 jiwa. Menurut Data Menur (PPLS-TNP2K) yang ada di UPTPK Kabupaten Sragen tahun 2012 yang telah di verifikasi ada perbedaan antara data PPLS dengan data yang dikeluarkan TNP2K yakni, 27.803 KK dengan jumlah warga miskin 40.244 jiwa. Sedangkan menurut data BPS Kabupaten Sragen tahun 2013 Jumlah penduduk 891.832 jiwa (Laki-laki: 441.672 jiwa dan Perempuan : 450.160 jiwa) dengan 276.9191 KK). Artinya penduduk miskin di Sragen tahun 2013 masih 31,69%). Dengan demikian kemiskinan di Kabupaten Sragen secara Presentase masi dua kali lipat kemiskinan nasional.

Kabupaten Sragen telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui program Kawasan Ramah Pelestarian Lingkungan (KRPL) disemua desa, namun yang dinilai paling berhasil ada di Desa Bendo. Dengan adanya otonomi daerah atau pola dkonsentrasi, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian/lembaga mulai diarahkan kependampingan. Dengan dikeluarkan nya PP No 15 tahun 2010 mengenai PNPM-mandiri pemerintah kabupaten sragen mulai

merancang pelaksanaan program dan pendanaan PNPM mandiri dengan cara melakukan pemetaan permasalahan sosial, potensi SDA dan SDM di seluruh desa.

Tahun 2011 melaksanakan pendataan keluarga miskin yang dikenal dengan Data PPLS-2011 data tersebut sebagai data terpadu yang harus dipaiki sebagai acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di semua kementerian/lembaga. Selain melaksanakan pendataan juga dimulainya pelaksanaan program PNPM-Mandiri di semua wilayah kabupaten/kota. Tahun 2012 Kabupaten Sragen masih melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM-Mandiri yang dilakukan TNP2K walaupun sudah ada peraturan Bupati Mengenai Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK). Hal ini disebabkan UPTPK yang terbentuk belum mulai bekerja, maka implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen masih dilakukan secara sektoral, belum terkoordinasi dimulai tahun 2013 dimulai tahun 2013 simulai dengan verifikasi Data TNP2K Sragen (Data Program Perlindungan Sosial) dan data PPLS tahun 2011 (BPS Kabupaten Sragen 2011). Dengan adanya UPTPK dan adanya program Kawasan Ramah Pelestarian Lingkungan KRPL di desa-desa yang ada pada wilayah Kabupaten Sragen yang pelaksanaanya dimulai tahun 2011 dengan dana PNPM-Mandiri per Desa mendapatkan dana sebesar Rp. 30.000.000.- yang digunakan untuk usaha masyarakat pedesaan. Dari dana bantuan tersebut di desa Bendo digunakan untuk usaha tani dan budidaya papaya kalifornia. Dari hasil evaluasi ternyata memiliki kemajuan yang paling pesat.

Potensi Pemberdayaan Masyarakat Lokal Pada Industri Kelapa Sawit

Survei sumber daya alam kelapa sawit di Kalimantan selatan menunjukkan bahwa jumlah kebun kelapa sawit secara keseluruhan adalah 272.508,17 ha dengan 70 perusahaan perkebunan besar kelapa sawit. 60.447,00 ha tanaman belum menghasilkan dan 212.061,17 ha tanaman menghasilkan. Berdasarkan status lahan, yang mempunyai ijin lokasi seluas 756.785,32 Ha, yang sudah dimanfaatkan sebagai perkebunan adalah 272.508,17 Ha, 350.209,81 Ha berupa Hak Guna Usaha (HGU) dn 116.081,03 berupa pan B yang masih dalam perencanaan. Jadi masih ada 290.584,48 Ha yang masih tersisa dan ini bisa digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Jumlah perusahaan terbanyak berada di Kabupaten Kotabaru (20 perusahaan), dan yang paling sedikit ada di kabupaten Banjar (3 perusahaan). Dari 13 Kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, ternyata kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Industri hilir kelapa sawit di Kalimantan Selatan, berkembang cukup pesat pada tahun 2013 ada 33 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan rician 26 pabrik yang sudah operasional dan sisanya 7 pabrik dalam tahap pembangunan. Tujuh pabrik tersebut 1 PKS di Kabupaten Banjar, 1 PKS di kabupaten Tapin, 1 PKS di Kabupaten PKS di bkabupaten Hulu Sungai Selatan. 2 PKS di Kab. Tanah Laut, 1 PKS di tanah bumbu, dan 1 PKS di Kab. Batola. Dari 26 PKS kapasitas yang mempunyai ijin dan kapasitas ter pasang adalah 1530 ton/jam. Rata rata produksi untuk semua PKS adalah 21.611.962,72 ton CPO/bulan dan 1.905.750,60 ton kernel oil/bulan. Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit terdapat 2 buah yaitu di desa Tarjun Kabupaten Kotabaru dan di desa pulau laut kabupaten Kotabaru.

Dari data ketersediaan, kesesuaian lahan dan perijinan yang telah ada, Kalimantan Selatan masih memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan industri kelapa sawit jika didukung oleh kebijakan dan strategi yang tepat, jaminan keamanan berusaha, penyediaan sumber dana yang memadai serta didukung oleh SDM yang kompeten. Kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan dapat memicu sejumlah masalah bahkan konflik antar pihak-pihak yang berkepentingan dan terkena dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah melalui kajian yang komprehensif. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memberdayakan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar industri kelapa sawit dengan meningkatkan kompetensinya melalui jalur pendidikan.

Tiga perkebunan terluas di Kalimantan Selatan berada di kabupaten Kotabaru yaitu 116.471,79 ha, kemudian Kabupaten Tanah Laut 42.175,47 ha. dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 30.680,68 ha. Penduduk yang tinggal di Kabupaten Kotabaru adalah 302.982 orang, tidak jauh berbeda dengan kabupaten Tanah laut 308. 510 orang dan Kabupaten Tanah Bumbu 295.032 orang. Kepadatan penduduk pada masing masing daerah tersebut adalah 31, 79 dan 58, orang/km dengan kepadatan penduduk per desa 1429, 2195 dan 1985 orang. Dari data tersebut terlihat Kabupaten Kotabaru

memiliki jumlah lahan perkebunan kelapa sawit terluas dan jumlah perusahaan besar terbanyak dan sudah memiliki 2 buah pabrik minyak goreng namun hanya ditinggali oleh penduduk dengan jumlah relatif kecil dan kepadatan penduduk yang rendah. Sedangkan Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah kebun agak kurang tetapi jumlah penduduk yang lebih banyak dan lebih padat. Jumlah penduduk yang bersekolah di Kalimantan selatan adalah. 109.870 orang murid SLTP dan 116.894 orang murid SLTA. Masyarakat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit umumnya hanya terlibat sebagai tenaga kerja buruh, baik buruh harian tetap maupun buruh harian lepas. Mereka hanya memperoleh kesempatan memperoleh pekerjaan pada level yang terendah. Untuk posisi lainnya yang sedikit lebih di atas berupa mandor dan petugas keamanan sangat sedikit sekali (sekitar 1-2 orang saja), bahkan pada beberapa desa yang di survai tidak ada sama sekali. Bahkan menurut masyarakat untuk dapat naik dari tenaga kerja harian lepas (THL) menjadi tenaga kerja tetap sangat sulit dan karena salah satu persyaratan utama yang cukup menghambat adalah masalah usia. Berdasarkan peraturan perusahaan, mereka yang berusia lebih dari 40 tahun tidak dapat diangkat menjadi tenaga kerja tetap. Akibatnya banyak tenaga kerja harian lepas (THL) yang berasal dari masyarakat setempat tidak bisa diangkat menjadi tenaga kerja tetap, padahal diantara mereka ada yang telah menjadi tenaga kerja harian lepas selama 5 - 10 tahun bahkan ikut merintis pembukaan kebun di wilayah tersebut.

Pendidikan vokasi berbasis industri kelapa sawit selain dapat meningkatkan serapan tenaga kerja lokal di perkebunan atau industri sawit juga akan meningkatkan peran pihak perusahaan dalam mendukung pendidikan masyarakat. Di satu sisi, pihak perusahaan dapat membantu masyarakat lokal dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta mempekerjakan mereka di perkebunan atau industri sawit. Di sisi lain pihak perusahaan juga akan memperoleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Bagi masyarakat, keterlibatan perusahaan dalam mendukung pendidikan vokasi berbasis industri kelapa sawit ini juga dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja di perusahaan atau industri sawit. Dengan kata lain, keterlibatan pihak perusahaan, masyarakat dan pemerintah melalui pendidikan vokasi ini di satu sisi dapat mendorong peningkatan rerata tingkat pendidikan masyarakat dan sekaligus meningkatkan daya serap perusahaan terhadap tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai dengan industri kelapa sawit.

Kesimpulan

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Sedangkan pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimilikinya serta upaya untuk membangkitkan nya. Pada hakikat nya pemberdayaan merupakan salah satu kegiatan yang lebih baik menekankan proses, maka partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan sangat diperlukan. Kesejahteraan Masyarakat akan berlangsung secara beriringan antara program pemberdayaan masyarakat dengan penguatan kapasitas masyarakat yang bersumber dari sosial budaya dan norma masyarakat setempat, sehingga desain pembangunan masyarakat tetap berakar pada masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- [1] A. Syahza, "Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit," *J. Ekon. Pembang. Kaji. Masal. Ekon. dan Pembang.*, vol. 12, no. 2, p. 297, 2011, doi: 10.23917/jep.v12i2.200.
- [2] J. Midgley, "Working Papers Assets in the Context of Welfare Theory ;," *Cent. Soc. Dev. Washingt. Univ. St. Louis*, no. 03, pp. 1–15, 2003.
- [3] Warzuqni Syahfitri Ismy, "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industri Pangan Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lampisang Kabupaten Aceh Besar)," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.
- [4] Desak Putu Yuli Kurniati, *Bahan Ajar Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bali: Bagian Promosi Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2015.

- [5] Zubaedi, *BUKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT (1).pdf*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- [6] Afriyani, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Tahu Di Desa Landsbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus,” Universitas Islam Negeri . Lampung, 2017.
- [7] K. W. Pratiwi, Nurazijah, R. Ruwaida, and Sufwatunnida, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rt 11 / 04 Kp . Pintu Desa Babelan Kota di Tengah Pandemi Covid-19,” *Proc. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, vol. 1, no. Desember, pp. 57–69, 2021.
- [8] M. H. S. Heru Kurniawan, “PRINSIP PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS BIOSENTRIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Nuansa*, vol. 14, no. 1, pp. 91–102, 2017, [Online]. Available: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- [9] A. A. Qur'an, “Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam,” *el-Jizya J. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 1–24, 2018, doi: 10.24090/ej.v5i1.1621.
- [10] B. P. Suyanto, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA SEJAHTERA (STUDI KASUS DI KABUPATEN SRAGEN),” *Sosio Konsepsia*, vol. 5, no. 01, pp. 17–35, 2015.
- [11] BPS Kalsel. (2014). Keadaan Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Agustus 2013. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- [12] Disbun Kalsel. Laporan Tahunan 2013, Banjarbaru: Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan.
- [13] Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Semarang : Jurnal Ilmiah Universitas PGRI.
- [14] Pudjianti, Bambang. Suyanto. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Sejahtera (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). Jakarta Timur: Kementerian Sosial RI
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Nt0iEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA109&dq=info:pIyTd1ccMsUJ:scholar.google.com&ots=h3y5A83_Al&sig=lwVETH85xLz1aJHVWPmwNZ_LkMk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false